

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bagir Manan. 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah, Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.

Sumardika, T.Subarsyah. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Bandung : Kencana Utama.

Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Nomensen Sinamo, 2016, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta.

Yahya Harahap, 2016, *Ruang Lingkup Eksekusi di Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nur Hasan Ismail, 2000, *Otonomi Bidang Pertanahan : Reposisi Peranan Pusat Dan Daerah*, dan Ideologi Politik Pertanahan, Yogyakarta.

Aslan Noor, 2006, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju.

Wijono Prodjokoro, 1961, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Pembimbing Masa.

Effendi Perangin 1991, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta : CV, Rajawali Pers.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika.

Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia.

H.Ali Achmad Chomzah, 2002 , *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak – hak Atas Tanah*, Kencana.

Maria S. W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Univeristas Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press.

J.Soepranti, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT.Rineka Cipta.

Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ronny H.Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

### **Jurnal Hukum**

Jurnal Diponegoro Law review Vol.5/No. 2/ 2016, Nadya Karina, *Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (Recht Van Eigendom Verponding) Dengan Tanah Hak Pakai Di Kota Tegal*.

Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.3/Jul-Sept/2013, Gabriela Georgina Vogese, *Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan di Era Otonomi Daerah*.

Jurnal Hukum Edisi No.2 Vol.XIV,2004, Bambang Eko TUurisno dan Sri Sudaryatmi, *Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam pemanfaatan Tanah Timbul*.

Jurnal Pranata Hukum Vol.10/No.1/Januari/2015, Noviasih Muharram, *Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah*.

### **Peraturan Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak Barat